

PENGARUH KINERJA KEUANGAN, FISCAL STRESS, DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Ahmad Syahral Huda

Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mataram
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Jalan Soekarno - Hatta, Giri Menang, Gerung, NTB
syahralahmad@gmail.com

Rr. Titiek Herwanti

Rr. Sri Pancawati

Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Mataram

***Abstract:** This study aims to determine the effect of Financial Performance, Fiscal Stress, and Population Density of the Allocation of Capital Expenditure. Tests performed on 10 (ten) Regency / City in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) which has resulted in Government Finance Report (LKPD) 2010-2014. The results provide empirical evidence that the financial performance of local governments in the form of the dependency ratio, the degree of fiscal decentralization, the ratio of fiscal space, as well as fiscal stress and population density has a significant influence on the allocation of capital expenditure, while the financial performance of local governments in the form of self-sufficiency ratio and the ratio of financing SiLPA has no significant effect on the allocation of capital expenditure on district / city in the Province of West Nusa Tenggara. This study is expected to provide input to the Regional Government of Regency / City in West Nusa Tenggara province in the implementation of regional autonomy and decentralization. Local governments as policy makers in the region are expected to be able to pay more attention to the allocation of revenue sources into the local expenditure especially capital expenditure in the budget that will have a direct impact on the welfare of the community through the development of human and physical development and infrastructure, and in order to boost the regional economy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian dilakukan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010-2014. Metode analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, rasio ruang fiskal, serta *fiscal stress* dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian dan rasio pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah daerah selaku

pengambil kebijakan di daerah diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan pengalokasian sumber-sumber pendapatan ke dalam belanja daerah terutama belanja modal dalam APBD yang akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia maupun pembangunan fisik dan infrastruktur, serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

Kata kunci: Kinerja Keuangan, *Fiscal Stress*, Kepadatan Penduduk, Belanja Modal

PENDAHULUAN

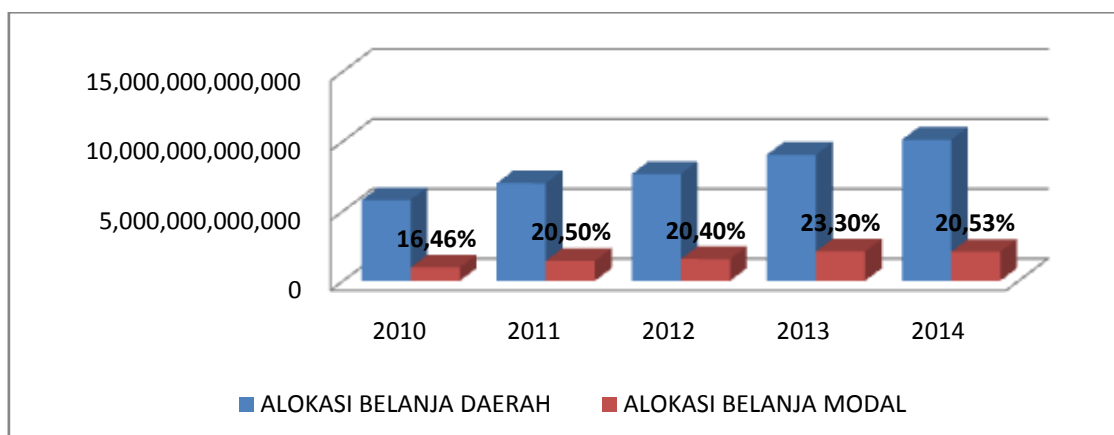
Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan deskripsi analisis APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2014 diungkap bahwa secara agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat termasuk dalam 5 provinsi yang memiliki rasio Belanja Pegawai lebih dari 50 %. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara agregat daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat tersebut hanya mengalokasikan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya.

Secara agregat Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat belum menempatkan belanja modal sebagai prioritas belanja daerah. Hal ini terbukti dimana sampai dengan tahun 2014 alokasi belanja modal hanya sebesar 20,53%. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Nasional tahun 2014 sebesar 26,14%. Hal ini juga belum memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dimana secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah.

Berikut adalah grafik perbandingan alokasi belanja modal dengan alokasi belanja daerah agregat Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2014:

Grafik 1
Perbandingan Alokasi Belanja Modal Terhadap Alokasi Belanja Daerah
Agregat Kabupaten dan Kota di NTB Tahun 2010-2014



Sumber: DJPK (diolah)

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era otonomi memerlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Mardiasmo (2002:121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan yang mengakomodir unsur-unsur yang terdapat dalam struktur APBD pemerintah daerah diantaranya unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rasio tersebut yaitu, Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Pembiayaan SiLPA dan Rasio Ruang Fiskal. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2007:231).

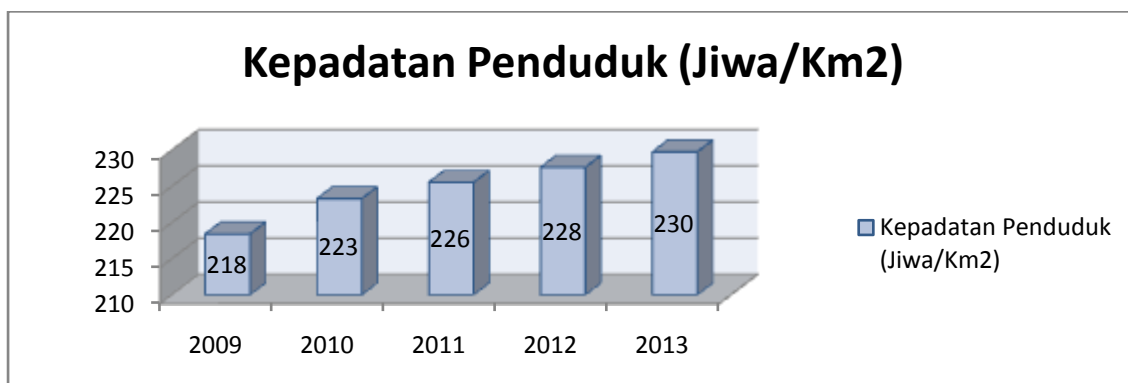
Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Adi, 2005). Shamsub dan Akoto (2004) menerangkan bahwa penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. Sebagian dari peran

ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan juga dapat menyebabkan timbulnya *fiscal stress*. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya Pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto Daerah (Saruc dan Sagbas 2008: 4).

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari dana perimbangan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mengukur kebutuhan pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum diantaranya adalah menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah sedangkan luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Penelitian ini menggunakan variabel rasio perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, atau rasio kepadatan penduduk (*population density*). Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² dalam suatu wilayah. Variabel kepadatan penduduk dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel non-keuangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal.

Berikut adalah trend kepadatan penduduk di Kabupaten dan Kota di NTB tahun 2009 - 2013:

Grafik 2
Trend Kepadatan Penduduk
Agregat Kabupaten dan Kota di NTB



Sumber : BPS-NTB (diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita amat trend kenaikan/penurunan kepadatan penduduk Kabupaten dan Kota di NTB antar tahun. Bila dicermati kepadatan penduduk cenderung terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2013, di

mana pada tahun 2009 kepadatan penduduk mencapai angka 218 jiwa/km² dan di tahun 2013 meningkat menjadi 230 jiwa/km². Dengan peningkatan tersebut artinya secara agregat Kabupaten dan Kota di NTB membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai konsekuensi logis atas kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang diwujudkan melalui anggaran belanja modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) dan Amalia (2013) dengan menambahkan variabel kepadatan penduduk. Alasan peneliti menambahkan variabel kepadatan penduduk karena peneliti ingin menguji pengaruh faktor non-keuangan yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Berdasarkan realitas Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2014 hanya mengalokasikan belanja modal sebesar 24,11% dari belanja daerah, sementara menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 belanja modal sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 29% dari belanja daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kepentingan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan publik.

Kontrak nyata antara agen dan *principal* di pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Eksekutif (agen) membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif (*principal*) untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). APBD dapat digunakan *principal* (legislatif) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (agen). Dalam hal ini, legislatif yang merupakan wakil dari publik dapat mengawasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan

potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002:139) inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis merupakan pengelolaan hati-hati tanpa ada pemborosan, sementara efisiensi adalah membandingkan antara jumlah output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, serta efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230).

Fiscal Stress

Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Adi, 2005).

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi; Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*. Kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *fiscal stress*; Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. Menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab *fiscal stress*. Tapi faktor utama adalah perilaku *overspending* dari pemerintah negara bagian/daerah.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan menurut Sarwono (1992) adalah suatu keadaan akan dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk ini menunjukkan

jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² dalam suatu wilayah. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah pemukiman di daerah tersebut.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang dalam hal ini diwujudkan melalui belanja modal. Penelitian oleh Fitri (2014) dan Arsa (2015) menemukan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Vegasari (2011) menemukan rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian yang berbeda menunjukkan perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah secara mandiri.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1a: Rasio Kemandirian Daerah tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio Ketergantungan menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Salah satu peran transfer dari pemerintah pusat adalah membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yakni peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hidayat (2013), Martini (2015) dan Arsa (2015) menemukan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah yang negatif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) dimana tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya dengan arah yang positif.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1b: Rasio Ketergantungan Daerah tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal

Derajat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari kontribusi Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak daerah terhadap total penerimaan daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang dibidang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka akan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah dianggap lebih mengerti sejauh mana kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsa (2015) menunjukkan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Lain halnya dengan penelitian oleh Badrudin (2011) yang menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian oleh Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1c: Derajat Desentralisasi Fiskal tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal

Besaran Ruang Fiskal daerah menunjukkan kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil daerah diluar belanja operasional daerah. Karena dalam menyusun anggaran (APBD) pemerintah daerah belum dapat mengetahui secara tepat pendapatan dan belanja yang akan terjadi, maka besaran yang dipakai adalah nilai estimasi. Dengan demikian, untuk mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah patut mempertimbangkan ruang fiskal yang tercipta pada tahun sebelumnya.

Hidayat (2013) menemukan bahwa rasio ruang fiskal tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Penelitian oleh Martini (2015) juga menemukan bahwa rasio ruang fiskal tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1d: Rasio Ruang Fiskal tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh Rasio Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Besarnya porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan

pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hidayat (2013) menemukan tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Berbeda dengan penelitian oleh Azkiya (2011) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1e: Rasio Pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh *fiscal stress* terhadap Alokasi Belanja Modal

Fiscal Stress adalah suatu tekanan yang dihadapi pemerintah daerah yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang menurun maupun belanja kesejahteraan/operasional daerah yang tinggi. Akibatnya pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerahnya untuk lebih memberikan porsi yang besar pada belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui belanja modal.

Setyawan dan Adi (2008) menemukan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap belanja modal. Ambarita (2011) menunjukkan *fiscal stress* secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan Amalia (2013) menemukan bahwa *fiscal stress* memiliki pengaruh positif dan langsung pada belanja modal.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: *Fiscal stress* berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur dengan menggunakan indikator tertentu yang di antaranya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Kedua indikator ini saling terkait dan secara bersama-sama mempengaruhi formulasi kebutuhan pendanaan daerah. Pendanaan daerah akan digunakan untuk memenuhi belanja langsung daerah yang salah satunya adalah untuk belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Plotnikova (2005) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sementara Aziz dan Wulandari (2014) menunjukkan kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H3: Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 10 (sepuluh) pemerintahan yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu mengambil seluruh anggota populasi sebagai objek penelitian. Masing-masing pemerintahan daerah akan diambil data keuangan dan non keuangannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 s/d 2014 sehingga total data yang akan diolah menjadi 50 data penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, rasio ruang fiskal, dan rasio pembiayaan SILPA, serta *fiscal stress* dan kepadatan penduduk, sedangkan variabel dependennya adalah alokasi belanja modal.

Alokasi belanja modal (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi/anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam anggaran APBD dengan formulasi:

$$\text{alokasi belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Daerah (X_{1a}) ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman. Rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Daerah:} \\ = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \end{aligned}$$

Rasio Ketergantungan Daerah (X_{1b}) dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan daerah, seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi Fiskal (X_{1c}) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari kontribusi Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak daerah terhadap total penerimaan daerah, seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ruang Fiskal (X_{1d}) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti dirumuskan berikut ini:

$$\text{Rasio ruang fiskal} = \frac{\text{Ruang fiskal}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$
$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Dana Otsus/Penyesuaian} - \text{Dana Darurat} - \text{hibah} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga}$$

Rasio Pembiayaan SiLPA (X_{1e}) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyerap sisa anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit APBD, seperti dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Fiscal Stress (X_2) diidentikkan dengan tingginya angka upaya pajak. Upaya Pajak (*Tax Effort*) diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto Daerah seperti dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Upaya Pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Kepadatan Penduduk (X_3) menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² dalam suatu wilayah yang diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Sumber data dari dokumen tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, data anggaran APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id, dan data kepadatan penduduk dan PDRB yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat melalui website www.ntb.bps.go.id.

Prosedur Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Berdasarkan penelitian dan kerangka pemikiran, maka analisis data akan dirumuskan dengan model sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 KMDR_{i,t-1} + \beta_2 KTGT_{i,t-1} + \beta_3 DDF_{i,t-1} + \beta_4 RF_{i,t-1} + \beta_5 SiLPA_{i,t-1} + \beta_6 FS_{i,t-1} + \beta_7 KP_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2 \dots N; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana:

- BM = Alokasi belanja modal
- KMDR = Rasio Kemandirian
- KTGT = Rasio Ketergantungan
- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- RF = Rasio Ruang Fiskal
- SiLPA = Rasio Pembiayaan SiLPA
- FS = *Fiscal stress*
- KP = Kepadatan penduduk

HASIL PENGUJIAN

Pemilihan Model Estimasi

Berikut merupakan output dari regresi data panel menggunakan Metode *Common Effect* (OLS), Metode *Fixed Effect* (FEM), dan Metode *Random Effect* (REM).

Tabel 1: Hasil Regresi Data Panel

Variabel Independen	Var.dependen: Alokasi Belanja Modal					
	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Coef.	p-value	Coef.	p-value	Coef.	p-value
Konstanta	47.92107	0.0013	8.297653	0.5682	46.24434	0.0001
Rasio Kemandirian (KMDR)	-0.234595	0.2260	-0.042618	0.8119	-	0.2163
Rasio Ketergantungan (KTGT)	-0.482429	0.0059	-0.076155	0.6175	-	0.0013
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	0.766321	0.0000	0.425920	0.0749	0.445975	0.0000
Rasio Ruang Fiskal (RF)	0.288193	0.0038	-0.153135	0.2102	0.765693	0.0059
Rasio Pembiayaan SiLPA (SiLPA)	-0.000627	0.9968	-0.057804	0.7045	0.000563	0.9964
Fiscal Stress (FS)	0.959165	0.1022	0.361175	0.4880	0.912768	0.0502
Kepadatan Penduduk (KP)	-0.000853	0.0446	0.020229	0.0055	-	0.0283
R ²	0.736014		0.886289		0.000859	0.626292
R ² adjust	0.692016		0.831157		0.564007	
Prob. (F-Stat)	0.000000		0.000000		0.000000	
DW	1.781115		2.453833		1.800399	
Chow-Test	H ₀ ditolak pada taraf α=5%					
Hausman-Test	H ₀ ditolak pada taraf α=5%					

Sumber: *Output Eviews*

Dalam pengujian yang dilakukan sebelumnya, estimasi parameter dalam data panel menurut Uji Hausman lebih tepat jika menggunakan Metode *Fixed Effect*, namun karena tidak memberikan interpretasi yang lebih baik

dibandingkandengan output Metode *Random Effect*, maka penelitian ini menggunakan Metode *Random Effect*. Ghozali (2011:59) menjelaskan ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Tujuan analisis regresi bukan semata ingin mendapatkan nilai R² tinggi, tetapi mencari nilai estimasi koefisien regresi dan menarik inferensi statistik. Dalam kenyataan empiris biasa ditemukan regresi dengan nilai R² tinggi, tetapi nilai koefisien regresi tidak ada yang signifikan atau memiliki tanda koefisien yang berlawanan dari yang diharapkan secara teori. Jadi sebaiknya peneliti lebih melihat logika atau penjelasan teoritis pengaruh variabel *explanatory* terhadap variabel dependen. Gujarati (2003) menyarankan apabila jumlah data cross section (N) lebih besar dari jumlah data time series (T) maka digunakan metode *random effect* dalam pengolahannya. Firmansyah (2008:120) juga menyatakan bahwa untuk kebutuhan analisis yang lebih luas, interpretasi ketiga model tersebut adalah tetap layak untuk dianalisis.

Dengan menggunakan Metode *Random Effect* ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada Metode *Fixed Effect*. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Secara umum persamaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_{it} = 46.24434 - 0.190342 KMDR_{i,t-1} - 0.445975 KTGT_{i,t-1} + 0.765693 DDF_{i,t-1} + 0.228136 RF_{i,t-1} + 0.000563 SiLPA_{i,t-1} + 0.912768 FS_{i,t-1} - 0.000859 KP_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang negatif. Kontribusi PAD dibandingkan dengan bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman belum mampu meningkatkan alokasi belanja modal Pemerintah Daerah dikarenakan anggaran Pemerintah Daerah yang dialokasikan setiap tahunnya lebih banyak diserap untuk kebutuhan belanja pegawai yang mencapai lebih dari 55%.

Tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang negatif. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada Dana Alokasi Umum yang menyumbang lebih dari 60% pendapatan daerah. DAU lebih banyak untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional lainnya sehingga belanja modal belum menjadi prioritas di daerah; Terkait adanya SILPA pada akhir tahun anggaran yang disebabkan karena tidak terserapnya anggaran belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal, sehingga walaupun anggaran telah disediakan namun tidak digunakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif. Dengan desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja modal

pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Rasio ruang fiskal tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai). Memperbesar ruang fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menstimulus perekonomian daerah.

Rasio pembiayaan SiLPA tahun lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif. Kontribusi SiLPA untuk menutup defisit APBD setiap tahunnya tidak terlalu besar berkisar dibawah 10%, artinya penyerapan APBD pemerintah mencapai lebih dari 90%. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap alokasi belanja modal.

Fiscal stress berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif. *Fiscal stress* yang tinggi menunjukkan semakin tingginya upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari sektor pajak. Sejalan dengan hal itu, harapan untuk terus meningkatkan penerimaan sendiri ini akan sulit terwujud apabila alokasi belanja untuk modal/ pembangunan tidak ditingkatkan

Kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif bisa disebabkan oleh penyebaran penduduk yang belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga pembangunan daerah belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ruang Fiskal berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan kinerja keuangan berupa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sementara *Fiscal Stress* dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

Berdasarkan hasil temuan maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTBT, agar Pemerintah Daerah harus lebih fokus pada upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah sekaligus mengurangi tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi anggaran, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali apa yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya. Belanja-belanja yang bersifat konsumtif tetapi memberikan *multiplier effect* yang kecil dalam perekonomian hendaknya dikurangi atau diperketat lagi, misalnya belanja untuk honor-honor, perjalanan dinas, belanja barang operasional, dan sebagainya.

Beberapa keterbatasan penelitian ini, diantaranya, (1) Secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukuran dalam analisis rasio terhadap organisasi sektor publik, khususnya APBD.(2) Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum adanya kesepakatan secara bulat mengenai pengukuran *fiscal stress*, sehingga pengukuran *fiscal stress* dengan *tax effort* belum tentu mengindikasikan adanya *fiscal stress*. (3) penelitian ini tidak memasukkan realisasi APBD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Frieda. 2013. *Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Dan Belanja Modal (Studi Empiris: Pada Kabupaten Se-Jawa Tengah 2006 - 2012 Dominan Kontribusi Sektor Industri Non Migas)*. Tesis. Program Pascasarjana Ekonomi UniversitasStikubank. Semarang
- Ambarita, Charles Fransiscus. 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ardhini, 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan*.Jurnal.Universitas Diponegoro. Semarang
- Arsa, I Ketut.2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan EkonomiPemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali*.Tesis. Universitas Udayana
- Aziz, Abdul dan Wulandari, Ririn (2014). *Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit Dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah*. Jurnal.815, 1/06/99/2010. Kementerian Keuangan RI.
- Azkiya, Ardan. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan DIY)*. Jurnal. Universitas Sebelas Maret.
- Badrudin, Rudy. 2011. *Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol.3 (3): 211-223.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2010. *Deskripsi dan Analisis APBD 2010*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firmansyah. 2008. *Ekonometrika Aplikasi Regresi Linier, Pooling Analisis, Dan Uji Kausalitas*. Arga Puji Press.Mataram
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Eviews*.Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, N. 2003. *Basic Econometrics, International Edition*. Published by Prentice- Hall International, Inc.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3.Salemba Empat. Jakarta

- Hidayat, Mochamad Fajar. (2013). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3 (4) :305-360.
- Kusnandar.Siswantoro, Dodik. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Erlangga.Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Martini, Kadek. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10 (2) :426-443
- Plotnikova, Maria. 2005. *The effect of a capital budget on capital spending in the U.S. States*. Thesis.Virginia Polytechnic Institute and State University
- Saruc, NaciTolga dan Isa Sagbas. 2008. *The Surge Impact of the Flypaper, Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey*. International Research Journal of Finance and Economics.EuroJournals Publishing, Inc.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1992. *Psikologi Lingkungan*. PT Grasindo.Jakarta
- Setyawan, Budi dan Priyo Hari Adi. 2008. *Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal*. Yogyakarta, Simposium Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis APTIK.
- Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. 2004. *State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 16 (1) : 40-61.
- Sularso, Havid&Restianto, Yanuar (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*, Media Riset Akuntansi, 1 (2).
- Susantih, Heny dan YuliaSaftiana.2007. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.